

Nomor : KSEI-27178/JKU/1125
Lampiran : 1 (satu) set dokumen
Klasifikasi Surat : Umum

13 November 2025

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) PT Chandra Asri Pacific Tbk

Sebagai tindak lanjut informasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 12 November 2025 selaku Wali Amanat Obligasi PT Chandra Asri Pacific Tbk, bersama ini terlampir disampaikan Undangan RUPO atas:

1. Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020
2. Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021
3. Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021
4. Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022
5. Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022
6. Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023
7. Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari
Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Chandra Asri Pacific Tbk;
3. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbis.co.id.

<FAA/Undangan RUPO> | Halaman 1/1

| TAX BUOYANCY |

PENERIMAAN PAJAK MAKIN TAK RESPONSIF

Bisnis, JAKARTA — Kinerja penerimaan pajak makin tidak elastis dengan perkembangan ekonomi. *Tax buoyancy*, ukuran yang menunjukkan responsivitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, makin menurun.

Surya D.A. Simanjuntak
redaksi@bisnis.com

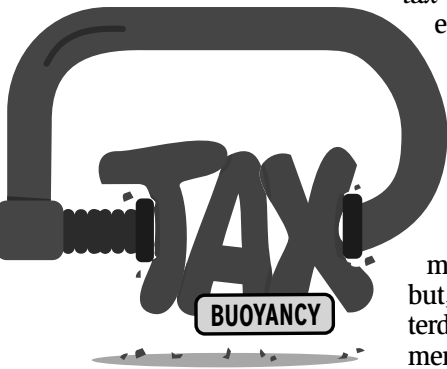
Tax buoyancy sepanjang Januari-September 2025 tercatat -0,88, berdasarkan perhitungan *Bisnis*. Angka itu didapat dari perbandingan antara pertumbuhan penerimaan pajak Januari-September dengan laju produk domestik bruto (PDB) kumulatif hingga September. Tingkat elastisitas itu lebih rendah dari periode sama tahun sebelumnya yang sudah -0,47 (*Lihat infografik*). Tren pemburukan kinerja penerimaan pajak tersebut dipicu oleh kemampuan daya pungut penerimaan pajak yang selama ini terus melemah. Skema *tax buoyancy* secara sederhana bisa

diartikan sebagai elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan PDB. Jika elastis, dengan realisasi pertumbuhan ekonomi kumulatif dari Januari-September 2025 sebesar 5,01%, maka idealnya, pertumbuhan penerimaan pajak 5,01%. Persoalannya sampai dengan kuartal III/2025 lalu, penerimaan pajak justru terkontraksi 4,4%, sehingga elastisitas penerimaan pajak -0,88. Angka ini mengonfirmasi bahwa penerimaan pajak tidak elastis karena setiap 1% pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan 1% penerimaan pajak. Kinerja *buoyancy* itu juga bisa diartikan bahwa penerimaan pajak tidak sebanding dengan performa ekonomi Indonesia.

Secara teoritik, tinggi rendahnya *tax buoyancy* itu bisa diukur melalui empat indikator.

★ *Tax buoyancy* atau ukuran yang menunjukkan elastisitas penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi makin menurun.

★ Penurunan elastisitas performa pajak itu terjadi di tengah perlambatan ekonomi.



Kinerja Perpajakan dan Elastisitasnya dengan Perekonomian

Periode	Penerimaan Pajak	Pertumbuhan	Laju PDB	Tax Buoyancy
Jan-Sep 2024	Rp1.354,86 triliun	-2,37%	5,03%	-0,47
Jan-Sep 2025	Rp1.295,3 triliun	-4,4%	5,01%	-0,88

Sumber: BPS, Perhitungan *Bisnis*, diajiah

BISNIS/MALBIR DAMARA

| PENYERAPAN ANGGARAN |

Prabowo Tugaskan Mensesneg

Bisnis, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan anggaran kementerian/ lembaga dan transfer ke daerah (TKD) menjelang akhir tahun. Penugasan itu diberikan Prabowo pada rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (11/11), sebelum dia bertolak ke Australia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Anthony Albanese. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden telah memerintahkan Prasetyo untuk melakukan koordinasi lintas kementerian dan memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal mendekati akhir tahun. “Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” kata Teddy, dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet. Teddy menyebut Prabowo menunda jadwal penerbangannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin rapatitu. Rapat tertutup itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR Sumfi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Seskab Teddy. Menurut Teddy, Prabowo memberikan arahan mengenai pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” tutur Teddy.

SURAT PURBAYA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyurati seluruh kepala daerah

berkaitan dengan realisasi belanja APBD yang lambat serta besarnya simpanan pemerintah daerah di perbankan hingga akhir kuartal III/2025. Melalui Surat Menteri Keuangan No.S-662/MK.08/2025 berjudul ‘Percepatan Pelaksanaan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025’, Purbaya mengatakan, berdasarkan pemantauan yang dilakukan hingga September 2025, dana TKD telah disalurkan Rp644,8 triliun atau 74% dari pagu APBN 2025 senilai Rp919,9 triliun. “Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana pemda di perbankan sampai dengan triwulan III 2025 mengalami kenaikan,” tulis Purbaya dalam surat tersebut. Purbaya lalu meminta pemda melakukan empat hal berdasarkan hasil pemantauan dimaksud, sekaligus untuk mendorong perekonomian nasional 2025 agar lebih baik. **Pertama**, mempercepat penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik. **Kedua**, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek proyek pemda. **Ketiga**, memanfaatkan dana simpanan pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah. **Keempat**, melakukan *monitoring* secara berkala, baik mingguan maupun bulanan, terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana pemda di perbankan hingga akhir 2025. Dia meminta hasil *monitoring* itu menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang ditetapkan Presiden. Surat itu dikirimkan Purbaya pada 20 Oktober, dengan tembusan Presiden, Menteri Dalam Negeri, Mensesneg, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu. (*Dany Saputra*)

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)

Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022
Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat dari:

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022; dan
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022;

(secara bersama-sama disebut “**Obligasi**”), yang diterbitkan oleh PT Chandra Asri Pacific Tbk (“**Emiten**”), suatu perseroan terbuka yang berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan:

- Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 2 tanggal 4 Juni 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 15 tanggal 24 Agustus 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021 No. 10 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021 No. 2 tanggal 8 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022 No. 3 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; dan
- Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 149 tanggal 27 Mei 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 144 tanggal 22 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

(secara bersama-sama disebut “**Perjanjian Perwaliamanatan**”), dengan ini mengundang para pemegang obligasi untuk masing-masing Obligasi (“**Pemegang Obligasi**”), untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Keterangan	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022	Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022
Hari / Tanggal	Rabu / 26 November 2025				
Waktu	08.00–09.00 WIB	09.30–10.30 WIB	17.30–18.30 WIB	11.00–12.00 WIB	13.00–14.00 WIB
Tempat	Fairmont Jakarta, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 10270				

Agenda RUPO:

Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 6.3.13 Perjanjian Perwaliamanatan tentang kewajiban keuangan Emiten dan pasal terkait lainnya yaitu penambahan definisi Ekuitas dan Utang Berbasis Non-Recourse serta perubahan definisi Utang Konsolidasian.

Tata Cara RUPO:

- Berdasarkan Pasal 10 ayat 7 huruf a angka 1 poin a Perjanjian Perwaliamanatan, RUPO dapat diselenggarakan dengan ketentuan RUPO dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- Berdasarkan Pasal 10 ayat 6 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

Catatan:

- RUPO ini diselenggarakan atas permintaan dan usulan Emiten.
- Pemegang Obligasi yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPO dan memiliki hak suara dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan dan sesuai ketentuan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), yaitu pada tanggal 20 November 2025.
- Formulir surat kuasa dan surat pernyataan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten, dapat diunduh secara langsung dari situs web Emiten (<http://www.chandra-asri.com/>) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPO.
- Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO diwajibkan untuk membawa dokumen sebagai berikut:
 - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli Surat Kuasa (apabila Pemegang Obligasi diwakili oleh kuasanya).
 - Salinan kartu identitas (KTP atau paspor) yang masih berlaku dari Pemegang Obligasi dan kuasanya yang akan menghadiri RUPO.
 - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh badan hukum atau badan usaha, maka diwajibkan untuk membawa dokumen tambahan sebagai berikut:
 - Apabila RUPO dihadiri oleh Direksi dan/atau pengurus badan hukum atau badan usaha:
 - Salinan akta pendirian (Anggaran Dasar) badan hukum atau badan usaha berikut dengan perubahan-perubahannya, serta persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menteri Kehakiman Republik Indonesia) (“**Menkum**”).
 - Salinan akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, serta penerimaan pemberitahuan dari Menkum.
 - Apabila RUPO dihadiri oleh kuasa Direksi dan/atau pengurus badan hukum atau badan usaha:
 - Salinan kartu identitas (KTP atau paspor) yang masih berlaku dari pemberi kuasa.
 - Salinan akta pendirian Anggaran Dasar badan hukum atau badan usaha berikut dengan perubahan-perubahannya, serta persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menkum.
 - Salinan akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, serta penerimaan pemberitahuan dari Menkum.
- Apabila RUPO berhasil menyetujui Agenda RUPO, Emiten akan memberikan insentif (kompensasi) sebesar 0,50% dari jumlah pokok Obligasi yang masih terutang kepada Pemegang Obligasi yang hadir atau memberikan kuasanya untuk hadir dan memberikan suara setuju dalam RUPO.
- Berdasarkan Pasal 10 ayat 6 huruf h Perjanjian Perwaliamanatan, pada saat registrasi RUPO, Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten.
- Untuk mempermudah pengaturan dan menjaga ketertiban RUPO, Pemegang Obligasi atau kuasanya yang hadir dalam RUPO dimohon dengan hormat untuk hadir 15 (lima belas) menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 12 November 2025

WALI AMANAT

btñ

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

EMITEN



Chandra Asri

PT Chandra Asri Pacific Tbk

| PEMERINTAHAN PRESIDEN TRUMP |

SINYAL KUAT AKHIR SHUTDOWN

Bisnis, JAKARTA — Penutupan pemerintah AS diyakini segera berakhir pada Rabu (12/11), setelah Senat meloloskan pendanaan sementara untuk badan-badan federal. Wall Street mengincar keuntungan lebih lanjut, setelah ekuitas menguat selama *shutdown*.

Lorenzo Anugrah Mahardhika & M. Fatkhul Maskur
redaksi@bisnis.com

Penutupan pemerintahan Amerika Serikat (AS), yang telah memecahkan rekor terlama 41 hari akhirnya mendaatkan titik terang baru setelah Senat pada Senin (10/11), meloloskan pendanaan sementara dengan 60 suara setuju, di tengah meningkatnya gangguan penerbangan, penundaan bantuan pangan, dan rasa frustrasi di kalangan pegawai federal yang sebagian besar tidak menerima gaji selama lebih dari sebulan.

Setelah lolos di Senat, giliran DPR yang dikuasai Partai Republik akan mengetuk palu atas rancangan undang-undang yang berisi paket belanja tersebut, yang memungkinkan sebagian besar pemerintahan tetap beroperasi hingga 30 Januari dan beberapa lembaga hingga 30 September.

Ketua DPR Mike Johnson mengatakan bahwa pihaknya berharap paket tersebut akan segera disahkan, seperti dilansir *Bloomberg*, Selasa (11/11).

DPR, yang belum memberikan suara sejak sebelum penutupan

dimulai, Rabu (1/10), diperkirakan akan mempertimbangkan tindakan tersebut pada Rabu (12/11), menurut kantor pimpinan Partai Republik dan Demokrat.

Jika disetujui, rancangan undang-undang itu akan diserahkan kepada Donald Trump untuk ditandatangani dan disahkan.

Persetujuan di Senat pengakhiran *shutdown* itu dicapai setelah sejumlah senator dari Partai Demokrat mencabut tuntutan partai untuk memperbarui subsidi Undang-Undang Perawatan Terjangkau yang akan berakhir, yang juga membuat marah kaum progresif yang telah mendukung konfrontasi berisiko tinggi dengan Trump.

Gubernur California dari Partai Demokrat Gavin Newsom menyebut kesepakatan itu ‘menyedihkan’, sedangkan Gubernur Illinois JB Pritzker mengancam pemungutan suara Senat atas tuntutan Demokrat sebagai ‘janji kosong’.

“Saya pikir itu adalah kesalahan besar,” kata Senator Elizabeth Warren, seorang Demokrat dari Massachusetts. “Rakyat AS ingin kita berdiri dan mem-

perjuangkan layanan kesehatan, dan itulah yang saya yakini.”

Pemimpin Demokrat DPR Hakeem Jeffries juga mengkritik rencana untuk membuka kembali pemerintahan, dengan mengatakan bahwa Demokrat di majelisnya tidak akan mendukungnya.

Namun, peluang pengakhiran *shutdown* itu terbuka di DPR. Selain Dewan yang didominasi Partai Republik, Andy Harris, Ketua Freedom Caucus yang berhaluan konservatif garis keras, yang menawarkan dukungan bersyarat.

“Oleh karena formatnya saat ini, saya mungkin akan memilih ya.”

Shutdown sejak Rabu (1/10) telah berdampak serius bagi perekonomian AS. Sekitar 750.000 pegawai federal cuti tanpa gaji, penerbangan mengalami gangguan akut, hingga jutaan warga berpenghasilan rendah tak lagi mendapatkan Program Bantuan Nutrisi Tambahan.

Setiap pekan *shutdown* diperkirakan mengikis pertumbuhan ekonomi AS sekitar US\$7 miliar atau 0,1 poin persentase terhadap PDB kuartal ke-4. Jika *shutdown* berlanjut 2 bulan atau lebih, kerugian permanen terhadap *output* ekonomi diestimasi 1,8-2,0 persen poin pada kuartal tersebut.

Namun, dampak lebih serius tampaknya tidak

Kita dapat bergerak maju dalam hal ini.

akan terjadi setelah kelompok Demokrat yang moderat menerima janji Republik bahwa Senat akan memberikan suara pada pertengahan Desember untuk memperpanjang kredit premi asuransi Obamacare.

Namun, tidak ada jaminan bahwa banyak anggota Republik akan mendukung subsidi diperpanjang agar disahkan di Senat. Bahkan, Johnson mengaku tidak akan menjamin pemungutan suara di DPR mengenai hal tersebut.

Kelompok moderat memisahkan diri dari partai, termasuk pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer. Hal ini memicu kemarahan di hanya beberapa hari setelah Demokrat merayakan kemenangan signifikan dalam pemilihan kepala daerah yang mempromosikan tindakan untuk mengatasi biaya hidup.

Di sisi lain, sinyal berakhirnya *shutdown* pemerintahan AS telah menambah daya ungkit di pasar saham, setelah menunjukkan penguatan sejak lebih dari sebulan terakhir.

S&P 500 naik 0,6% dalam 40 hari

sejak pemerintahan AS tutup pada 1 Oktober, lalu menguat lebih besar pada Senin (10/11). Sekarang, jika mengacu pada sejarah, patokan ditetapkan untuk reli menuju musim liburan.

Satu bulan setelah 15 penutupan sebelumnya berakhir, S&P 500 naik 2,3% rata-rata, menurut data yang dikumpulkan oleh Sam Stovall, Kepala Strategi Pasar di CFRA. Kenaikan sebesar itu akan membuat patokan ekuitas Amerika sedikit di bawah 7.000 pada pertengahan Desember.

Para investor bersorak atas meredanya ketegangan akibat spekulasi bahwa kerusakan yang meluas pada ekonomi dan keuntungan perusahaan telah dihindari. Perhatian sekarang dapat beralih ke jalur kebijakan moneter—pemotongan suku bunga Federal Reserve ketiga berturut-turut diperkirakan bulan depan—dan dampak tarif terhadap inflasi.

“Kita dapat bergerak maju dalam hal ini, tetapi kemudian dengan cepat perhatian pasar akan kembali ke diskusi seputar teknologi dan bagian terbesar pasar,” kata Keith Lerner, Kepala Investasi dan Kepala Strategi Pasar di Truist Advisory Services Inc. ■

• Senat meloloskan pendanaan sementara di tengah meningkatnya gangguan penerbangan, penundaan bantuan pangan, dan frustrasi pegawai federal.

• DPR yang dikuasai Partai Republik diproyeksikan menyetujui rancangan undang-undang paket belanja, untuk selanjutnya ditandatangani Presiden Trump.

• Wall Street mengincar panen keuntungan lebih lanjut, setelah ekuitas menguat selama *shutdown* karena laba perusahaan.

Beberapa Pergerakan Utama Di Pasar, Selasa (11/11)

Saham

- Stoxx Europe 600 naik 0,8%
- S&P 500 sedikit berubah
- Nasdaq 100 turun 0,1%
- Indeks MSCI Asia Pasifik turun 0,1%
- Hang Seng Hong Kong turun 0,1%
- Komposit Shanghai turun 0,4%
- Kontrak berjangka Euro Stoxx 50 naik 0,4%

Sumber: Bloomberg, 2025
BISNIS/MUHAMMAD AFANDI

Mata Uang

- Indeks Spot Dolar Bloomberg naik 0,2%
- Euro sedikit berubah di US\$1,1552
- Yen Jepang sedikit berubah pada 154,23 per US\$
- Yuan lepas pantai sedikit berubah pada 7,1246 per US\$
- Poundsterling Inggris turun 0,4% menjadi US\$1,3123

Mata Uang Kripto

- Bitcoin turun 0,4% menjadi US\$105.229,25
- Ether naik 0,5% menjadi US\$3.556,86

Obligasi

- Imbal hasil obligasi 10 tahun Jepang tidak berubah di 1,690%
- Imbal hasil obligasi 10 tahun Australia sedikit berubah di 4,39%

Komoditas

- Emas spot naik 0,3% menjadi \$4.129,82 per ons
- Minyak mentah West Texas Intermediate turun 0,5% menjadi \$59,85 per barel

Rally Saham AS selama Shutdown



PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)

Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 (“**Obligasi**”), yang diterbitkan oleh PT Chandra Asri Pacific Tbk (“**Emiten**”), suatu perseroan terbuka yang berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 No. 4 tanggal 9 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“**Perjanjian Perwaliamanatan**”), dengan ini mengundang para pemegang obligasi (“**Pemegang Obligasi**”), untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Keterangan	Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023
Hari / Tanggal	Rabu / 26 November 2025
Waktu	14.30–15.30 WIB
Tempat	Fairmont Jakarta, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 10270

Agenda RUPO:

Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 6.3.13 Perjanjian Perwaliamanatan tentang kewajiban keuangan Emiten dan pasal terkait lainnya yaitu penambahan definisi Ekuitas serta perubahan definisi Utang Konsolidasian dan Utang Berbasis Non-Recourse.

Tata Cara RUPO:

- Berdasarkan Pasal 10 ayat 7 huruf a angka 1 poin a Perjanjian Perwaliamanatan, RUPO dapat diselenggarakan dengan ketentuan RUPO dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- Berdasarkan Pasal 10 ayat 6 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

Catatan:

- RUPO ini diselenggarakan atas permintaan dan usulan Emiten.
- Pemegang Obligasi yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPO dan memiliki hak suara dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan dan sesuai ketentuan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), yaitu pada tanggal 20 November 2025.
- Formulir surat kuasa dan surat pernyataan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten, dapat diunduh secara langsung dari situs web Emiten (<http://www.chandra-asri.com/>) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPO.
- Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO diwajibkan untuk membawa dokumen sebagai berikut:
 - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli Surat Kuasa (apabila Pemegang Obligasi diwakili oleh kuasanya).
 - Salinan kartu identitas (KTP atau paspor) yang masih berlaku dari Pemegang Obligasi dan kuasanya yang akan menghadiri RUPO.
 - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh badan hukum atau badan usaha, maka diwajibkan untuk membawa dokumen tambahan sebagai berikut:
 - Apabila RUPO dihadiri oleh Direksi dan/atau pengurus badan hukum atau badan usaha:
 - Salinan akta pendirian (Anggaran Dasar) badan hukum atau badan usaha berikut dengan perubahan-perubahannya, serta persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menteri Kehakiman Republik Indonesia) (“**Menkum**”).
 - Salinan akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, serta penerimaan pemberitahuan dari Menkum.
 - Apabila RUPO dihadiri oleh kuasa Direksi dan/atau pengurus badan hukum atau badan usaha:
 - Salinan kartu identitas (KTP atau paspor) yang masih berlaku dari pemberi kuasa.
 - Salinan akta pendirian Anggaran Dasar badan hukum atau badan usaha berikut dengan perubahan-perubahannya, serta persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menkum.
 - Salinan akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, serta penerimaan pemberitahuan dari Menkum.
- Apabila RUPO berhasil menyetujui Agenda RUPO, Emiten akan memberikan insentif (kompensasi) sebesar 0,50% dari jumlah pokok Obligasi yang masih terutang kepada Pemegang Obligasi yang hadir atau memberikan kuasanya untuk hadir dan memberikan suara setuju dalam RUPO.
- Berdasarkan Pasal 10 ayat 6 huruf h Perjanjian Perwaliamanatan, pada saat registrasi RUPO, Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten.
- Untuk mempermudah pengaturan dan menjaga ketertiban RUPO, Pemegang Obligasi atau kuasanya yang hadir dalam RUPO dimohon dengan hormat untuk hadir 15 (lima belas) menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 12 November 2025

WALI AMANAT

btn

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

EMITEN



Chandra Asri

PT Chandra Asri Pacific Tbk

| INTERNASIONALISASI MATA UANG |

China Dorong Pembiayaan Reminbi

Bisnis, JAKARTA — Bank sentral China, People's Bank of China, (PBOC) bakal terus mendorong pembiayaan menggunakan mata uang yuan oleh entitas luar negeri.

PBOC mengatakan biaya pinjaman yang rendah dan meningkatnya permintaan terhadap yuan di luar negeri akan menjadi pendorong penting bagi upaya internasionalisasi mata uang yuan.

Negeri Panda akan mempromosikan peran yuan sebagai mata uang pendanaan (*funding currency*) sebagai salah satu langkah utama untuk mempercepat internasionalisasinya.

Hal itu tertulis dalam laporan tahunan PBOC yang dirilis pada 30 Oktober 2025. PBOC berkomitmen mendukung penggunaan berbagai instrumen pendanaan yang termasuk pinjaman dalam yuan, obligasi Panda, obligasi yuan luar negeri, dan pembiayaan perdagangan untuk mempermudah akses institusi dan perusahaan asing terhadap mata uang tersebut.

Laporan terbaru itu mencerminkan tekad Beijing untuk memperkuat peran yuan dalam sistem moneter global serta kesediaannya menyediakan lebih banyak likuiditas yuan bagi entitas luar negeri. Langkah itu juga menjadi cara untuk memperluas penggunaan mata uang yuan secara global, meski China tetap menerapkan kontrol ketat terhadap arus modal keluar.

Biaya pinjaman yuan yang murah kini disebut menjadi nilai jual baru karena kebijakan moneter yang cukup longgar dan tekanan deflasi di dalam negeri China telah menekan imbal hasil obligasi jauh di bawah imbal

hasil obligasi pemerintah AS.

Xiaojia Zhi, ekonom di Credit Agricole CIB, Hong Kong, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari rencana China untuk memperluas penggunaan renminbi untuk berbagai keperluan.

“Seiring turunnya imbal hasil di China, renminbi (yuan) bisa menjadi lebih menarik sebagai mata uang pendanaan. China dapat mendorong perkembangan pasar obligasi panda dan obligasi yuan luar negeri, yang akan membantu memperbesar cadangan likuiditas yuan di luar negeri,” ujar Zhi dikutip *Bloomberg*, Selasa (11/11).

Dalam beberapa tahun terakhir, China telah mencatat kemajuan dalam upayanya menginternasionalisasi yuan. Data dari jaringan pesan keuangan global SWIFT menunjukkan pada September, yuan menjadi mata uang kedua yang paling banyak digunakan di pasar pembiayaan perdagangan global dengan volume penyelesaian transaksi mencapai 7,3% dari total.

Beijing sebenarnya telah lama berupaya mempromosikan penggunaan yuan dalam aktivitas lintas batas sebagai bagian dari strategi untuk melindungi perekonomiannya dari risiko geopolitik dan memperkuat keamanan finansial.

Meskipun dolar masih mempertahankan dominasinya dalam transaksi global, China semakin berani tahun ini dalam mendorong inisiatif penggunaan yuan, berusaha memanfaatkan meningkatnya kekhawatiran terhadap *greenback* setelah kebijakan AS yang tidak konsisten mengguncang pasar keuangan. (*Dwi Nicken Tari*)

| EMITEN BATU BARA |

BARA PTBA TEREDAM HARGA

Bara kinerja PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) mulai meredup pada akhir September 2025, seiring dengan pelemahan harga batu bara. Dividen perseroan pun diperkirakan bakal berada di bawah tekanan jika mengacu kepada capaian kinerjanya saat ini.

Annisa K. Saumi
redaksi@bisnis.com

Emiten batu bara, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) tercatat membukukan penurunan laba bersih hingga 56,85% secara tahunan pada kuartal III/2025 menjadi Rp1,39 triliun dari Rp3,23 triliun pada akhir September 2024. Meski, pendapatan perseroan pada periode tersebut sebenarnya meningkat 2,20% menjadi Rp31,3 triliun, dari sebelumnya Rp30,65 triliun pada kuartal/2024.

Direktur Utama PTBA Arsal Ismail dalam keterangan resminya mengatakan bahwa PTBA masih mampu mempertahankan kinerja operasionalnya di tengah tekanan harga batu bara global yang terus menurun sepanjang 2025.

Selain itu, perusahaan juga mampu menjaga profitabilitas melalui peningkatan efisiensi biaya dan optimalisasi portofolio pasar domestik.

“Hal ini tecermin dari pertumbuhan volume produksi dan penjualan yang tetap positif, serta realisasi capex yang mendukung keberlanjutan operasi dan proyek logistik

strategis,” ucap Arsal, Kamis (30/10).

Sampai dengan akhir September 2025, PTBA memproduksi batu bara sebanyak 35,89 juta ton, naik 9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 32,9 juta ton.

Penjualan PTBA pada 9 bulan pertama 2025 juga naik 8% menjadi 33,7 juta ton, dari 31,2 juta ton pada kuartal III/2024.

Sayangnya, pelemahan harga batu bara, baik Newcastle Index yang anjlok 22% *year-on-year* (YoY), dan ICI-3 yang turun 16% YoY berimbas pada pelemahan harga jual rata-rata hingga 6% YoY.

PTBA juga melaporkan total aset pada akhir September 2025 sebesar Rp42,8 triliun atau naik 3% dibandingkan dengan akhir 2024 yang senilai Rp41,8 triliun, dengan saldo kas dan setara kas sebesar Rp4 triliun atau turun 3% dibandingkan dengan akhir 2024 yang tercatat sebesar Rp4,1 triliun.

Sementara itu, total liabilitas pada akhir September 2025 tercatat naik dari posisi pada akhir Desember 2024 sebesar Rp19,1 triliun, naik menjadi Rp22,1 triliun. Sementara itu, ekuitas PTBA tercatat menurun dari posisi akhir Desem-

ber 2024 sebesar Rp22,6 triliun menjadi Rp20,8 triliun pada akhir September 2025.

Untuk belanja modal, sampai dengan September 2025 PTBA telah merealisasikan sebanyak Rp3,0 triliun, dengan mayoritas digunakan untuk pengembangan angkutan Tanjung Enim—Kramasan.

Corporate Secretary Division Head PTBA Eko Prayitno menyampaikan, perusahaan telah melakukan *cost leadership* dari sisi internal secara konsisten agar bisa mencapai kinerja yang optimal.

“Perbaikan harga diharapkan membawa dampak positif seiring dengan berbagai strategi *marketing* maupun operasional yang dilakukan oleh perusahaan,” ujar Eko.

Ke depan, kata Eko, PTBA akan terus mendorong efisiensi biaya, meningkatkan kinerja, dan memperluas portofolio usaha yang berkelanjutan.

mester I/2025 hanya mencapai 25% dari proyeksi laba setahun penuh.

“*Dividend yield* diperkirakan akan turun di bawah 10%, meskipun rasio pembayaran dividen tetap di 75%,” tulis Arief dalam risetnya.

Arief juga mencermati tekanan dari kenaikan biaya dan melemahnya permintaan dari pasar ekspor utama bakal membayangi PTBA.

“Pertumbuhan produksi dan peningkatan kapasitas transportasi diperkirakan akan membantu PTBA mencapai target 50 juta ton pada 2025, tetapi margin tetap tertekan akibat kenaikan biaya bahan bakar, logistik, dan *stripping*,” katanya.

Sementara itu, Analis Panin Sekuritas Andhika Audrey mengatakan bahwa penjualan domestik sepanjang 9 bulan pertama 2025 menjadi tumpuan bagi PTBA, dengan porsi lebih dari 50%. Hal itu memberikan tekanan pada harga jual rata-rata batu bara PTBA pada kuartal III/2025.

Panin Sekuritas tetap memberikan rekomendasi *hold* untuk saham PTBA, dan target harga Rp2.400 per saham dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti penurunan harga di pasar global, capex jumbo tahun ini yang berisiko menekan kas internal hingga berimplikasi negatif terhadap dividen ke depannya.

“Kami menyarankan investor

untuk *wait and see* terhadap rencana inisiatif efisiensi dari sisi transportasi PTBA,” ujar Andhika.

Kemudian, Analis Ciptadana Sekuritas Thomas Radityo memberikan rekomendasi *sell* untuk saham PTBA, dengan target harga Rp1.600.

Ciptadana Sekuritas juga mencermati harga batu bara yang lemah berpotensi menekan kinerja dan prospek dividen PTBA.

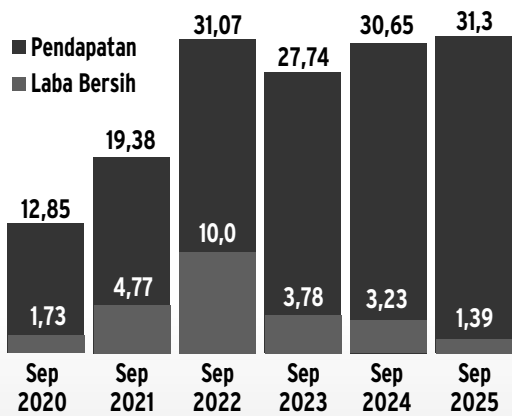
Thomas memperkirakan laba bersih PTBA pada 2025 hanya akan mencapai Rp1,64 triliun, atau turun 67,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun kinerja perusahaan diproyeksi bakal pulih pada paruh kedua 2025 akibat peningkatan volume penjualan dan harga jual rata-rata yang membaik.

Hal itu pun kemudian bisa berdampak pada *yield* dividen yang terbatas sekitar 3,7% pada 2026.

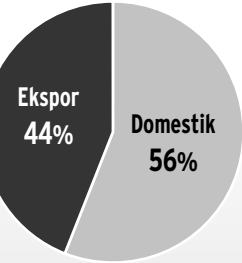
Akan tetapi, Ciptadana Sekuritas masih melihat ada peluang bagi PTBA, yang mencakup *rebound* harga batu bara ICI, penurunan biaya tunai atau *cash cost*, dan peningkatan efisiensi operasional.

Pada perdagangan kemarin, Selasa (11/11), saham PTBA ditutup stagnan pada level Rp2.390 per saham. Level tersebut juga mencerminkan penurunan sebesar 10,82% sejak awal tahun ini atau *year-to-date* (YtD). ▣

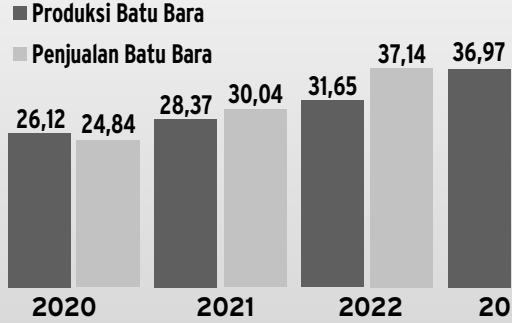
Kinerja Keuangan PTBA (Rp Triliun)



Porsi Penjualan Batu Bara PTBA



Kinerja Operasional PTBA (Juta Ton)



| AKSI BREN |

Modal Jumbo untuk Panas Bumi

Bisnis, JAKARTA — PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) siap menggelontorkan belanja modal sebanyak US\$250 juta pada tahun depan untuk mencapai target peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi menjadi 1 gigawatt.

Presiden Direktur BREN Hendra Soetjipto mengatakan, BREN telah menetapkan target tambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) menjadi 2,43 gigawatt (GW) sampai dengan 2032. Untuk jangka pendek, perusahaan membidik target 1 GW pada tahun depan.

“Kemudian akan didorong oleh proyek-proyek geotermal dalam jangka panjang, dengan potensi tambahan sebesar 900 megawatt [MW], sehingga menjadi 1,9 GW pada 2030,” katanya, Selasa (11/11).

Dalam skenario terbaik yang diukur BREN, masih akan ada tambahan kapasitas 525 MW, sehingga pada 2032 kapasitas panas bumi perusahaan ditargetkan mampu mencapai 2,43 GW.

Direktur BREN Ching Chee mengatakan, capex yang dialokasikan perseroan pada tahun depan akan bertambah seiring dengan proyek berjalan yang digarap perusahaan untuk mencapai target penambahan kapasitas geotermal.

“Kami merencanakan [capex] US\$250 juta, lebih tinggi diban-

dingkan dengan tahun ini. Ini sejalan dengan aktivitas yang kami miliki, dengan retrofit pada aset-aset kami, serta unit 3 dan 7 [Wayang Windu],” kata Chiam.

Sepanjang Januari—September 2025 BREN membukukan kinerja keuangan yang solid, dengan pertumbuhan pada sisi *bottom line* maupun *top line*.

BREN mencatat laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US\$106,55 juta, tumbuh 23,8% dibandingkan dengan periode yang sama 2024 senilai US\$86,06 juta.

Dari sisi *top line*, pendapatan perseroan meningkat 3,6% secara tahunan (*year-on-year*/YoY) dari US\$441,29 juta menjadi US\$457,39 juta.

Segmen penjualan listrik menjadi kontributor terbesar dengan porsi 47,01% senilai US\$215,03 juta, atau naik 5,9% YoY.

Sejalan dengan kapasitas pembangkit listrik yang bertambah, Chiam optimistis progres proyek panas bumi BREN akan terefleksi dalam kinerja keuangan tahun depan. Meski begitu, dia enggan menyebut pasti target angkanya.

“Kami berekspektasi 2026 akan menjadi tahun yang kuat dalam hal pendapatan dan laba bersih. Saya pikir kami sudah menunjukkannya pada 9 bulan pertama tahun ini,” ucapnya. (Akbar Maulana al Ishaqi)



- PTBA mampu membukukan pertumbuhan penjualan di tengah penurunan harga batu bara global.
- Pelemahan harga batu bara global berimbas pada merosotnya harga jual rata-rata perusahaan.
- Mayoritas penjualan batu bara PTBA untuk pasar domestik.

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 (“Obligasi”), yang diterbitkan oleh PT Chandra Asri Pacific Tbk (“Emiten”), suatu perseroan terbuka yang berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 No. 1 tanggal 1 September 2023 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“Perjanjian Perwalianamanatan”), dengan ini mengundang para pemegang Obligasi (“Pemegang Obligasi”), untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Keterangan	Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023
Hari / Tanggal	Rabu / 26 November 2025
Waktu	16.00–17.00 WIB
Tempat	Fairmont Jakarta, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 10270

Agenda RUPO:

Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 6.3.13 Perjanjian Perwalianamanatan tentang kewajiban keuangan Emiten.

Tata Cara RUPO:

- Berdasarkan Pasal 10 ayat 7 huruf a angka 1 poin a Perjanjian Perwalianamanatan, RUPO dapat diselenggarakan dengan ketentuan RUPO dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- Berdasarkan Pasal 10 ayat 6 huruf g Perjanjian Perwalianamanatan, Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

Catatan:

- RUPO ini diselenggarakan atas permintaan dan usulan Emiten.
- Pemegang Obligasi yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPO dan memiliki hak suara dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan dan sesuai ketentuan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yaitu pada tanggal 20 November 2025.
- Formulir surat kuasa dan surat pernyataan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten, dapat diunduh secara langsung dari situs web Emiten (<http://www.chandra-asri.com>) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPO.
- Salinan akta susunan Direksi dan/atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO diwajibkan untuk membawa dokumen sebagai berikut:
 - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli Surat Kuasa (apabila Pemegang Obligasi diwakili oleh kuasanya).
 - Salinan kartu identitas (KTP atau paspor) yang masih berlaku dari Pemegang Obligasi dan kuasanya yang akan menghadiri RUPO.
 - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh badan hukum atau badan usaha, maka diwajibkan untuk membawa dokumen tambahan sebagai berikut:
 - Apabila RUPO dihadiri oleh Direksi dan/atau pengurus badan hukum atau badan usaha:
 - Salinan akta pendirian (Anggaran Dasar) badan hukum atau badan usaha berikut dengan perubahan-perubahannya, serta persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menteri Kehakiman Republik Indonesia) (“Menkum”).
 - Salinan akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, serta penerimaan pemberitahuan dari Menkum.
 - Apabila RUPO dihadiri oleh kuasa Direksi dan/atau pengurus badan hukum atau badan usaha:
 - Salinan kartu identitas (KTP atau paspor) yang masih berlaku dari pemberi kuasa.
 - Salinan akta pendirian Anggaran Dasar badan hukum atau badan usaha berikut dengan perubahan-perubahannya, serta persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menkum.
 - Salinan akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, serta penerimaan pemberitahuan dari Menkum.
- Apabila RUPO berhasil menyetujui Agenda RUPO, Emiten akan memberikan insentif (kompensasi) sebesar 0,50% dari jumlah pokok Obligasi yang masih terutang kepada Pemegang Obligasi yang hadir atau memberikan kuasanya untuk hadir dan memberikan suara setuju dalam RUPO.
- Berdasarkan Pasal 10 ayat 6 huruf h Perjanjian Perwalianamanatan, pada saat registrasi RUPO, Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten.
- Untuk mempermudah pengaturan dan menjaga ketertiban RUPO, Pemegang Obligasi atau kuasanya yang hadir dalam RUPO dimohon dengan hormat untuk hadir 15 (lima belas) menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 12 November 2025

WALI AMANAT



PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

EMITEN



Chandra Asri

PT Chandra Asri Pacific Tbk